



PEMERINTAH  
KABUPATEN MOJOKERTO

# RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
2023





PEMERINTAH  
KABUPATEN MOJOKERTO

# RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
2023



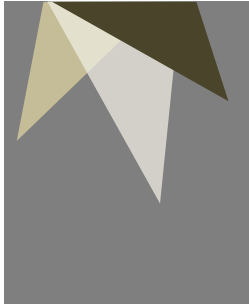


**PEMERINTAH  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**Judul : RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT)  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
TAHUN 2024  
Kabupaten Mojokerto**

Penanggungjawab:  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Mojokerto

2023



## kata pengantar



Dengan memanjatkan syukur ke hadirat *Allah subhanahu wa ta'ala*, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-*Nya*, sehingga penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 Kabupaten Mojokerto ini dapat terselesaikan. Dokumen Rencana Aksi Tahunan ini merupakan penjabaran dari Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025 untuk tahun 2022.

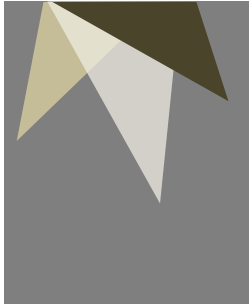
Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 Kabupaten Mojokerto ini pada intinya berisikan program-program dan kegiatan-kegiatan berikut indikator dan target-target yang hendak di capai dalam penanggulangan kemiskinan pada dimensi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah turut serta secara aktif dalam proses penyusunan dokumen RAT-PK ini kami mengucapkan terima kasih, semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat digunakan menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih memihak kepada masyarakat miskin di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Maret 2023

TKPK  
Kabupaten Mojokerto

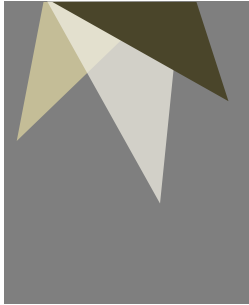




## daftar isi

	Halaman:
Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
Daftar Singkatan .....	vi
<b>Bab I    Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	3
1.3. Landasan Hukum .....	3
1.4. Sistematika .....	6
<b>Bab II    Profil Kemiskinan Kabupaten Mojokerto .....</b>	<b>7</b>
2.1. Kondisi Umum Daerah .....	7
2.2. Kondisi Kemiskinan Konsumsi .....	17
2.3. Kondisi Kemiskinan Non Komsumsi .....	20
<b>Bab III   Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan .....</b>	<b>23</b>
3.1. Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan .....	23
3.2. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto.....	28
<b>Bab IV    Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan (RAT) .....</b>	<b>35</b>
<b>Bab V    Penutup .....</b>	<b>59</b>
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	



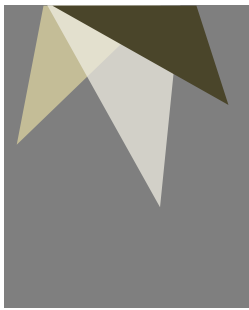


## daftar tabel

Halaman:

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah .....	9
Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Mojokerto menurut Kecamatan, Tahun 2021 dan 2022 .....	12
Tabel 2.3. Distribusi PDRB Kabupaten Mojokerto menurut Kelompok Lapangan Usaha, Tahun 2017-2021 (dalam %) .....	14
Tabel 2.4. PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017-2021	16
Tabel 2.5. Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Non Konsumsi Kabupaten Mojokerto, Tahun 2018-2022 .....	20
Tabel 3.1. Upaya-Upaya dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan .....	30
Tabel 4.1. Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 .....	36
Tabel 4.2. Rekomendasi Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Mojokerto .....	54

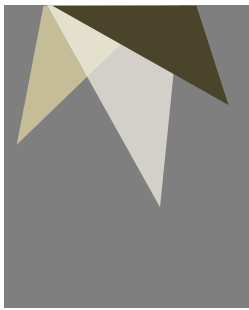




## daftar gambar

	Halaman:
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Mojokerto .....	10
Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto .....	11
Gambar 2.3 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2018-2022 .....	18
Gambar 2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto, Tahun 2018-2022 .....	18
Gambar 2.5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Kepa- rahan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2018-2022 .....	19
Gambar 3.1 Sasaran Makro Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 .....	24





## daftar singkatan

AKB	: Angka Kematian Bayi
AKABA/AKBA	: Angka Kematian Balita
AKI	: Angka Kematian Ibu
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
APtS	: Angka Putus Sekolah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ART	: Anggota Rumah Tangga
BDT	: Basis Data Terpadu
BPNT	: Bantuan Pangan Non-Tunai
BPS	: Badan Pusat Statistik
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
KRTP	: Kepala Rumah Tangga Perempuan
LP2KD	: Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PBDT	: Pemutakhiran Basis Data Terpadu
PKH	: Program Keluarga Harapan
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PPFM	: Program Penanganan Fakir Miskin
Perpres	: Peraturan Presiden
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri



PPLS	: Pendataan Program Perlindungan Sosial
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RAT	: Rencana Aksi Tahunan
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPKD	: Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
RT	: Rumah Tangga
RTM	: Rumah Tangga Miskin
RTSM	: Rumah Tangga Sangat Miskin
RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni
Ruta	: Rumah Tangga
SD	: Sekolah Dasar
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDKI	: Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
RPKD	: Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TKK	: Tingkat Kesempatan Kerja
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka





# PENDAHULUAN

*dokumen*

**RAT-PK 2024 Kab. Mojokerto**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

Kemiskinan menjadi masalah serius yang sulit terurai bak lingkaran setan. Benih-benih kemiskinan terus tumbuh dan berkembang di antara ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Mirisnya, kondisi ini merupakan potret rakyat kecil di Indonesia. Mereka tertatih-tatih membiayai hidup yang semakin mahal di tengah himpitan ekonomi dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

Dalam menghadapi persoalan kemiskinan, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, melalui program-program penanggulangan kemiskinan berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menghadapi persoalan-persoalan kemiskinan telah menunjukkan capaian-capaian yang signifikan, dimana salah satunya

adalah capaian perkembangan persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang meskipun berfluktuasi tetapi masih menunjukkan pola perkembangan dengan trend menurun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2013 persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 10,94 persen dan pada tahun 2022 turun menjadi sebesar 9,71 persen.

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto, maupun program-program yang pendanaannya sharing dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dengan sasaran penerima manfaat adalah masyarakat/rumah tangga miskin di Kabupaten Mojokerto.

Sebagaimana amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode Tahun 2021-2025. Dan sebagai tindak lanjut dari telah disusunnya dokumen RPKD tersebut, maka perlu disusun dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto.

## 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran.

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto adalah memberi pedoman/acuan bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menyusun program/kegiatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto ini adalah terumuskannya program dan kegiatan berikut indikator dan target penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2024.

## 1.3. Landasan Hukum.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto mengacu pada regulasi-regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4844) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor   ), yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor );
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Bupati Mojokerto tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

#### 1.4. **Sistematika.**

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto disusun dengan sistematika:

- Bab I    Pendahuluan
- Bab II   Profil Kemiskinan Daerah
- Bab III  Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
- Bab IV  Rencana Aksi Tahunan (RAT)
- Bab V   Penutup



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



# Profil Kemiskinan Daerah

*dokumen*

**RAT-PK 2024 Kab. Mojokerto**

## BAB II

# Profil Kemiskinan Daerah

### 2.1. Kondisi Umum Kabupaten Mojokerto.

#### 2.1.1. Geografi dan Adminisstrasi Wilayah.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur yang terletak pada  $111^{\circ}20'13''$  sampai dengan  $111^{\circ}40'47''$  Bujur Timur dan  $07^{\circ}18'35''$  sampai dengan  $07^{\circ}47'30''$  Lintang Selatan, dengan luas wilayah 692,15 Km<sup>2</sup>.

Secara geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai, hanya berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya dengan batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik;
- sebelah barat : Kabupaten Jombang;
- sebelah selatan : Kabupaten Malang, dan
- sebelah timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

Disamping itu wilayah Kabupaten Mojokerto juga mengitari wilayah Kota Mojokerto yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto.

Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di tengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan

bagian pegunungan yang subur. Bagian tengah merupakan bagian dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur.

Sekitar 30 persen dari wilayah Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan kemiringan kurang dari 15 derajat.

Pada umumnya ketinggian di wilayah Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter di atas permukaan laut (kecuali kecamatan Trawas yang dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan laut).

Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai sebanyak 61 buah yang sudah mempunyai nama, dan sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto adalah Sungai Brantas dengan debit air  $\pm 10.031$  liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit  $\pm 262$  liter/detik.

Sesuai dengan letak geografis, iklim di Kabupaten Mojokerto merupakan iklim daerah tropis, dalam setahun ada 2 musim yaitu musim kemarau antara bulan Maret sampai bulan Agustus dan musim penghujan antara bulan September sampai bulan Februari. Curah hujan paling tinggi di bulan Januari dan hari hujan paling banyak pada bulan Desember.

Secara administratif Kabupaten Mojokerto terbagi ke dalam 18 (delapan belas) kecamatan yang terbagi menjadi 299 desa dan 5 Kelurahan, dimana wilayah Kecamatan Dawarblandong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dengan luas wilayah  $58,93 \text{ km}^2$  atau sekitar 8,69 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya



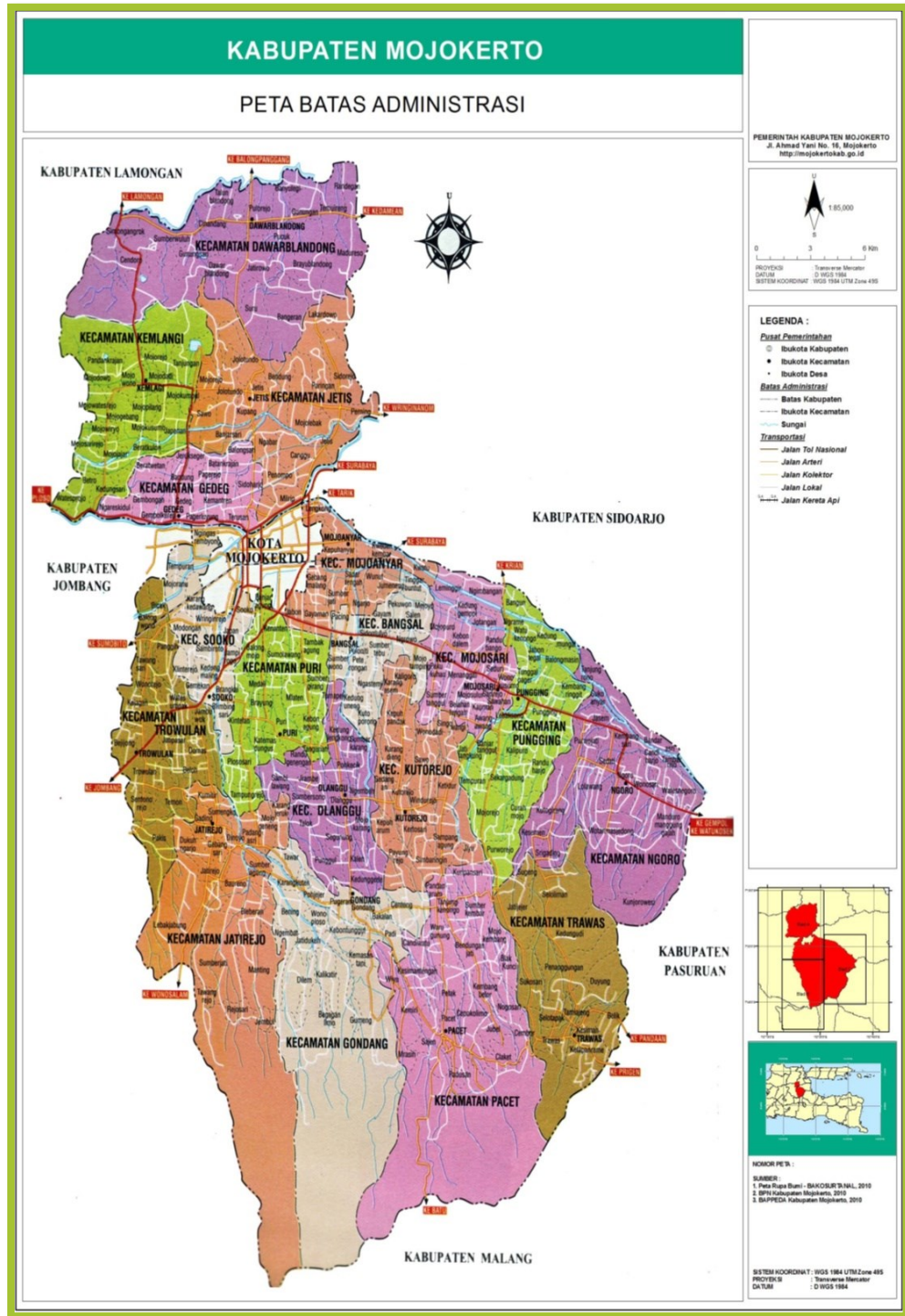
Kecamatan Ngoro adalah kecamatan dengan wilayah terluas kedua dengan luas wilayah 57,48 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,30 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mojokerto, dan kecamatan Jetis merupakan kecamatan terluas ketiga dengan luas wilayah 57,17 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,26 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Gedeg dengan luas wilayah 22,98 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,32 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.1  
Pembagian Wilayah Administratif dan Luas Wilayah

Kecamatan	Jumlah				Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
	Desa	Kelurahan	RW	RT	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
01 Jatirejo	19	-	103	351	32,98
02 Gondang	18	-	82	282	39,11
03 Pacet	20	-	133	435	45,16
04 Trawas	13	-	74	246	29,86
05 Ngoro	19	-	104	551	57,48
06 Pungging	19	-	171	582	48,14
07 Kutorejo	17	-	132	369	42,83
08 Mojosari	14	5	134	495	26,65
09 Bangsal	17	-	60	230	24,06
10 Mojoanyar	12	-	64	256	23,02
11 Dlanggu	16	-	88	301	35,42
12 Puri	16	-	137	431	35,65
13 Trowulan	16	-	110	408	39,20
14 Sooko	15	-	113	404	23,46
15 Gedeg	14	-	101	381	22,98
16 Kemlagi	20	-	134	369	50,05
17 Jetis	16	-	124	474	57,17
18 Dawarblandong	18	-	159	353	58,93
Jumlah	299	5	2.023	6.918	692,15

Sumber: Publikasi BPS, data di olah

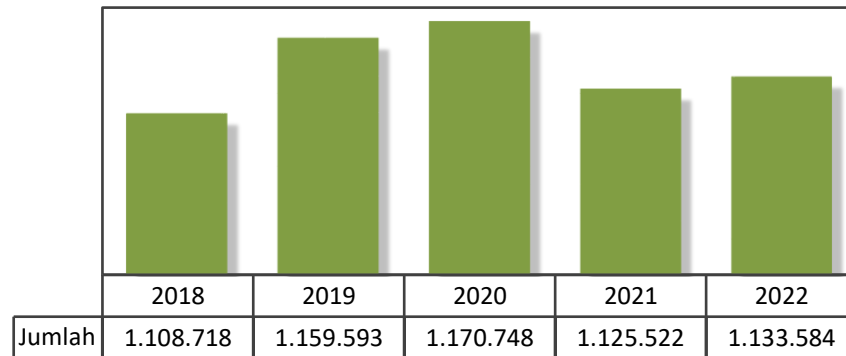
Gambar 2.1  
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Mojokerto



### 2.1.2. Demografi.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 berjumlah 1.133.584 jiwa. Kondisi ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,72 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 1.125.522 jiwa.

Gambar 2.2  
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto,  
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Mojokerto – data di olah

Angka kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 sebesar  $\pm 1.638$  jiwa/km<sup>2</sup>, angka ini mengalami naik jika dibandingkan angka kepadatan penduduk tahun 2021 yang sebesar  $\pm 1.626$  jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 terdapat di Kecamatan Sooko dengan kepadatan penduduk sebanyak  $\pm 3.209$  jiwa/km<sup>2</sup> dan pada tahun 2022 angka kepadatannya turun menjadi  $\pm 3.230$  jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Dawar Blandong merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu pada tahun 2021 sebesar  $\pm 860$  jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan pada tahun 2022 angka kepadatannya turun menjadi  $\pm 864$  jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 2.2  
Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan  
di Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021 dan 2022

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Jatilejo	32,98	44.325	1.344,00	44.707	1.355,58
020 Gondang	39,11	43.119	1.102,51	43.470	1.111,48
030 Pacet	45,16	58.913	1.304,54	59.399	1.315,30
040 Trawas	29,86	31.011	1.038,55	31.227	1.045,78
050 Ngoro	57,48	85.431	1.486,27	85.883	1.494,14
060 Pungging	48,14	79.258	1.646,41	79.850	1.658,70
070 Kutorejo	42,83	66.977	1.563,79	67.807	1.583,17
080 Mojosari	26,65	78.176	2.933,43	78.475	2.944,65
090 Bangsal	24,06	51.103	2.123,98	51.462	2.138,90
100 Mojoanyar	23,02	50.808	2.207,12	51.154	2.222,15
110 Dlanggu	35,42	55.733	1.573,49	56.201	1.586,70
120 Puri	35,65	78.532	2.202,86	79.200	2.221,60
130 Trowulan	39,20	74.829	1.908,90	75.366	1.922,60
140 Sooko	23,46	75.278	3.208,78	75.798	3.230,95
150 Gedeg	22,98	56.708	2.467,71	57.013	2.480,98
160 Kemlagi	50,05	58.016	1.159,16	58.535	1.169,53
170 Jetis	57,17	86.621	1.515,15	87.137	1.524,17
180 Dawarblandong	58,93	50.684	860,07	50.900	863,74
<b>Jumlah</b>	<b>692,15</b>	<b>1.125.522</b>	<b>1.626,12</b>	<b>1.133.584</b>	<b>1.637,77</b>

Sumber: BPS. Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, Tahun 2022 dan Tahun 2023, data di olah

### 2.1.3. Ekonomi Daerah.

Untuk dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah adalah dengan mengetahui struktur ekonomi suatu daerah yang antara lain dapat diketahui dengan melihat perkembangan PDRB (Produk Domestik

Regional Bruto), tingkat pendapatan per kapita masyarakat serta pergeseran struktur perekonomian daerah, dan perkembangan laju inflasi.

#### 1) Struktur Ekonomi.

Struktur ekonomi Kabupaten Mojokerto dapat diketahui dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto pada kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Selama lima tahun terakhir (Tahun 2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto di dominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya lapangan usaha Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Mojokerto. Kelima kategori tersebut, memberikan kontribusi sebesar 87,77 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 57,77 persen (angka ini meningkat dari 53,09 persen di tahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,28 persen (naik dari 10,24 persen di tahun 2017). Berikutnya lapangan usaha Pertanian, kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,66 persen (turun dari 8,62 persen di tahun 2017) dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,72 persen (naik dari 5,40 persen di tahun 2017).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut di atas, Industri Pengolahan mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya lapangan usaha Konstruksi peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan ketiga lapangan usaha lainnya, peranannya berfluktuasi tetapi cenderung menurun. Sementara peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Gambaran secara lengkap distribusi PDRB Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3  
Distribusi PDRB Kabupaten Mojokerto menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2017-2021 (dalam %)

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB-ADHB Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,62	8,13	7,79	7,96	7,66
B Pertambangan dan Penggalian	0,96	0,97	0,94	0,93	0,93
C Industri Pengolahan	53,09	53,48	53,83	54,56	55,77
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F Konstruksi	10,01	9,93	9,70	8,99	8,33
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,24	10,41	10,52	10,07	10,28
H Transportasi dan Pergudangan	1,26	1,30	1,34	1,30	1,30
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,17	2,20	2,23	1,94	1,94
H Informasi dan Komunikasi	5,40	5,31	5,34	5,81	5,72
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	1,58	1,55	1,57	1,53
L Real Estate	1,49	1,50	1,50	1,56	1,49

Lanjutan tabel 2.3.

Lapangan Usaha		Distribusi PDRB-ADHB Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
M,N	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,32	2,36	2,42	2,48	2,32
P	Jasa Pendidikan	1,34	1,32	1,31	1,35	1,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	0,38	0,39	0,44	0,43
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,85	0,86	0,85	0,75	0,75
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, PDRB Kab. Mojokerto menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

## 2) Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 semakin naik. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Mojokerto tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 63.699.840,43 juta rupiah. Angka tersebut naik dari 60.198.699,38 juta rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 4,12 persen.

## 3) PDRB per Kapita.

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi makro lain terkait tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yaitu merupakan hasil bagi antara nilai tambah

yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah/wilayah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat pada daerah/wilayah tersebut.

Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Mojokerto atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 77,53 juta rupiah. Secara nominal mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 84,46 juta rupiah (lihat tabel 2.4). Angka PDRB per Kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.4  
PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Mojokerto  
Tahun 2018-2022

	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Nilai PDRB (Milyar Rupiah)</b>					
- ADHB	76.678,34	82.387,91	81.940,86	87.261,74	95.738,11
- ADHK 2010	55.256,61	58.467,15	57.818,42	60.198,69	63.699,84
<b>Nilai PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)</b>					
- ADHB	69.159,46	73.651,05	73.335,46	77.530,01	84.456,12
- ADHK 2010	49.838,29	52.266,98	51.746,35	53.485,14	56.199,13
Pertumbuhan PDRB per Kapita (%)	5,00	4,87	-1,00	3,36	5,06

Sumber: BPS. Berita Resmi Statistik No. 02/2/3516/Th. V, 28 Februari 2023

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Mojokerto atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 hingga 2019 menunjukkan trend meningkat, pada tahun

2020 (pada saat pandemi Covid-19) nilai PDRB per kapita mengalami penurunan terhadap tahun sebelumnya. Kembali membaik pada tahun 2021.

Bila di lihat secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB per kapita selama tahun 2018-2022, masih menggambarkan pola perkembangan dengan *trend* yang cenderung meningkat. Peningkatan atau penurunan angka PDRB per kapita dari tahun ke tahun, akan membawa pengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

## 2.2. Kondisi Kemiskinan Konsumsi.

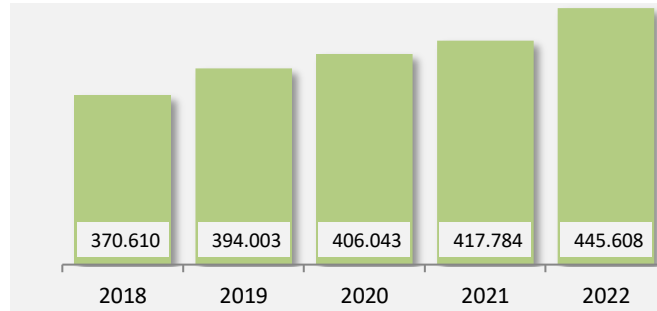
### 2.2.1. Garis Kemiskinan.

Dasar penghitungan jumlah penduduk miskin di hitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum (konsumsi minimum). Besaran rupiah tersebut untuk selanjutnya disebut dengan garis kemiskinan, yang merupakan kumpulan titik potong (*cut off points*) dari kelompok miskin dan tidak miskin.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama periode 5 tahun terakhir (tahun 2018-2022) adalah sebagaimana digambarkan melalui grafik pada gambar 2.3 yang menampilkan bahwa Garis Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2018-2022 terus meningkat. Dari tahun 2018 hingga tahun 2022, Garis Kemiskinan di

Kabupaten Mojokerto naik sekitar 75 ribu rupiah yaitu dari Rp. 370.610 per kapita per bulan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 445.608 per kapita per bulan di tahun 2022.

Gambar 2.3  
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2018-2022



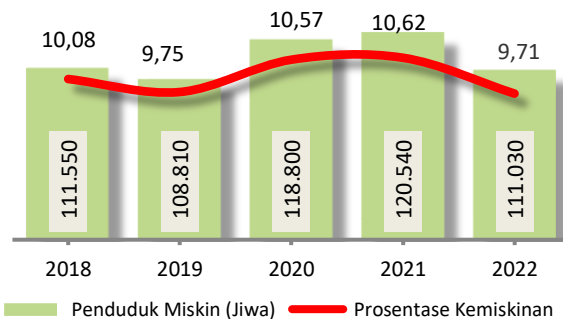
Sumber: Publikasi BPS – data diolah.

### 2.2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah sebanyak 111.030 jiwa, turun sebanyak 9.510 jiwa dibandingkan jumlah penduduk miskin tahun 2021. Dengan demikian persentase penduduk miskin pada tahun 2022 adalah sebesar 9,71 persen atau turun sebesar 0,91 persen terhadap persentase penduduk miskin tahun 2021.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2018-2025), perkembangan

Gambar 2.4  
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto, Tahun 2018-2022



Sumber: Publikasi BPS– data di olah

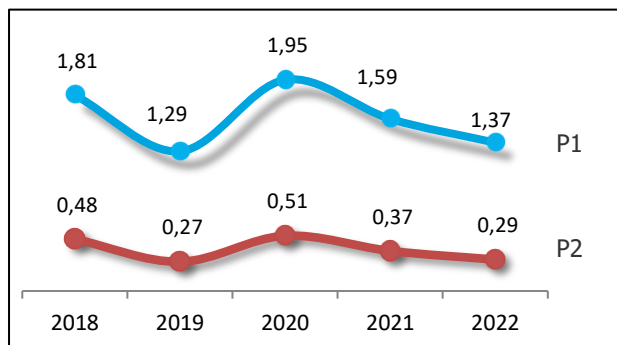
jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto meski berfluktuasi, akan tetapi secara keseluruhan menampilkan pola perkembangan dengan trend yang meningkat.

### 2.2.3. Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah sebesar 1,37 mengalami penurunan sebesar 0,22 digit jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021. Sementara itu Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah sebesar 0,29 mengalami penurunan sebesar 0,08 digit jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama periode tahun 2018-2022, menunjukkan perkembangan angka yang fluktuatif dengan trend yang cenderung menurun.

Gambar 2.5  
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)  
dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)  
Kabupaten Mojokerto, Tahun 2018-2022



Sumber: Publikasi BPS - data di olah

### 2.3. Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi.

Kondisi perkembangan capaian indikator kemiskinan non konsumsi (bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Infrastruktur Dasar, dan bidang Ketahanan Pangan) di Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun terakhir (tahun 2018-2022) adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.5  
Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Kemiskinan Non Konsumsi,  
Tahun 2018-2022

Indikator	Capaian Tahun (dalam %)				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Bidang Pendidikan:</b>					
APM SD/MI sederajat	99,49	99,75	97,78	97,25	95,60
APM SMP/MTs sederajat	83,55	98,08	83,84	83,31	83,89
APM SMA/SMK/MA sederajat	78,97	80,31	75,47	75,60	74,95
APtS SD/MI sederajat	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
APtS SMP/MTs sederajat	0,028	0,020	0,020	0,020	0,00
APtS SMA/SMK/MA sederajat	0,038	0,032	0,030	0,030	0,03
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,18	8,49	8,51	8,64	8,97
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,53	12,61	12,88	12,95	12,96
AMH Penduduk Usia 15+	96,36	96,07	95,53	95,25	96,41
<b>Bidang Kesehatan:</b>					
AKN per 1000 kelahiran hidup	6,67	5,38	3,85	3,60	3,10
AKB per 1000 kelahiran hidup	8,61	6,81	4,58	4,80	4,50
AKABA per 1000 kelahiran hidup	0,48	0,60	0,06	0,10	0,60
AKI per 100ribu kelahiran hidup	113,56	89,60	114,40	418,00	43,70
Balita Stunting (%)		9,40	6,82	5,32	3,90

Lanjutan tabel 5,

Indikator	Capaian Tahun (dalam %)				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Balita Gizi Buruk (%)	0,27	0,30	0,68	0,30	0,30
Balita Gizi Kurang (%)	6,09	5,49	7,60	3,70	2,40
Imunisasi Dasar Lengkap	99,80	100,00	100,00	100,00	100,00
Persalinan di tolong nakes	100,00	98,49	94,64	100,00	100,00
Persalinan di di fasyankes	98,14	98,18	94,61	92,14	100,00
Rasio bidan	29,85	49,48	58,06	62,30	72,00
Angka Harapan Hidup (AHH)	72,24	72,43	72,53	72,59	72,93
<b>Bidang Ketenagakerjaan:</b>					
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,27	3,68	5,75	5,54	4,83
Penduduk usia kerja iddle	21,47	23,30	24,05	23,72	22,74
<b>Bidang Infrastruktur Dasar:</b>					
Akses Air Minum Layak	97,02	98,87	99,20	98,61	97,05
Akses Sanitasi Layak	84,96	91,30	91,02	93,84	94,80
Akses Listrik (PLN, non-PLN)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Status Bangunan Milik Sendiri	94,08	91,64	92,14	92,23	94,87
Luas Lantai Rumah 8m <sup>2</sup> per kapita atau lebih	99,62	100,00	98,98	99,05	99,27
Rumah Tidak Layak Huni	5,57	5,63	5,39	5,24	5,09
<b>Bidang Ketahanan Pangan:</b>					
Produktivitas padi (kw/tahun)	59,42	61,78	57,63	57,95	58,29
Angka Rawan Pangan	3,87	3,79	3,91	3,85	2,00
<b>Rata<sup>2</sup> harga bahan pokok:</b>					
▪ Beras	9.705	9.670	10.017	10.056	10.000
▪ Gula pasir lokal	10.810	10.890	13.557	12.675	12.650
▪ Minyak goreng curah	11.049	11.090	11.917	13.100	15.500

Lanjutan tabel 5,

Indikator	Capaian Tahun (dalam %)				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
▪ Daging sapi local	100.542	99.635	102.107	102.936	108.500
▪ Daging ayam ras	32.139	31.395	30.500	30.875	30.500
▪ Telur ayam ras	21.387	21.760	22.637	22.281	29.750
▪ Cabai merah	25.215	28.975	28.159	38.063	27.000
▪ Bawang merah	19.251	21.650	29.302	22.438	28.500
▪ Bawang putih	20.079	26.255	23.837	22.000	20.500





# **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

*dokumen*

**RAT-PK 2024 Kab. Mojokerto**



## **BAB III**

# **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

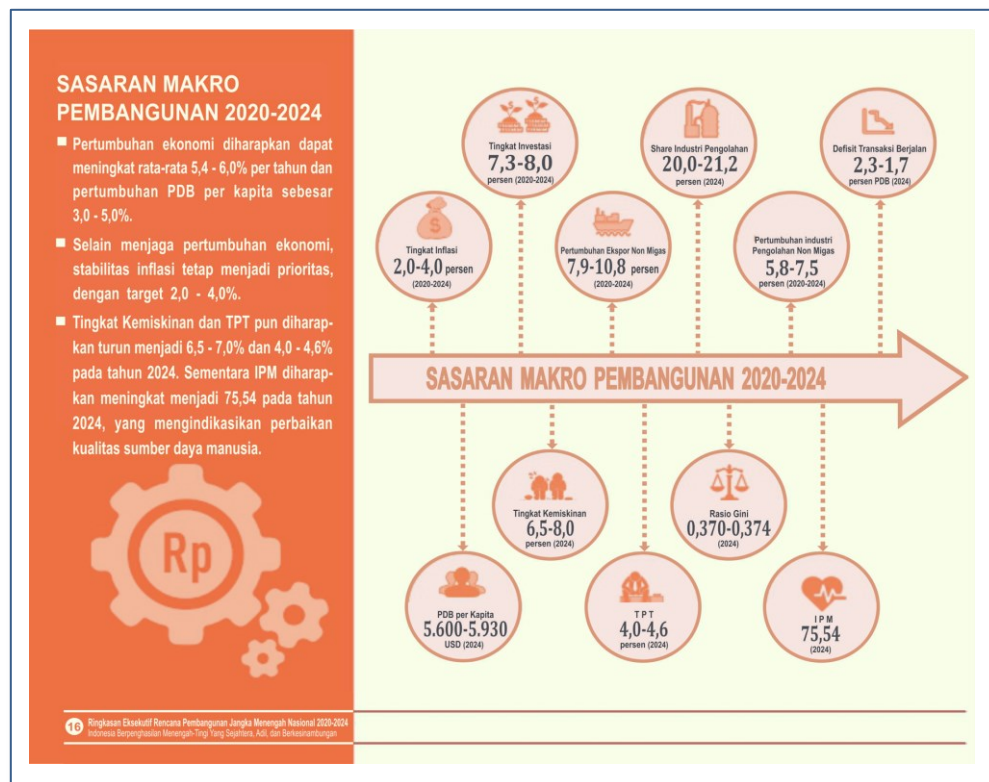
### **3.1. Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan.**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema

tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

Fokus kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan adalah pengurangan beban penduduk miskin dan peningkatan pendapatan masyarakat kurang mampu (40 persen terbawah) dengan target pembangunan nasional untuk angka pengangguran ditargetkan pada tahun 2024 adalah sebesar 4,0-4,6 persen, dan angka kemiskinan pada tahun 2024 berada pada angka 6,5-7,0 persen. Dengan catatan, kondisi ini akan tercapai bila ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, investasi padat tenaga kerja, dan inflasi terkendali.

Gambar 3.1  
Sasaran Makro Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024



Sumber: RPJMN 2020-2024. Bappenas, 2019

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, pada pasal 16 dinyatakan bahwa Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program.

Adapun strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada pasal 17 adalah:

- (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- (2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- (3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- (4) sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang pada pasal 18 Permendagri No. 53 Tahun 2020 adalah:

- (1) program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- (2) program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan



- (3) program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Sedangkan sasaran penerima manfaat dari Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan (Permendagri No 53/2020, pasal 19).

Berdasarkan uraian di atas dan dalam era desentralisasi ini, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama yang menentukan keberhasilan percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, terutama melalui perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan untuk menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menegaskan bahwa penguatan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai komponen penting di daerah dalam proses pembangunan telah dikenali sebagai pendekatan kunci dalam pencapaian perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada rakyat miskin.

Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut diperlukan sumber daya dan kapasitas dalam merencanakan program dan kegiatan yang secara spesifik dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Diantaranya melalui kegiatan yang mencakup bantuan-bantuan sosial ekonomi, perbaikan akses dan kesempatan bagi



masyarakat miskin dan rentan untuk menerima layanan pendidikan dan kesehatan, kebijakan pengembangan infrastruktur dan keterampilan bagi angkatan kerja. Dalam memahami permasalahan kemiskinan baik pemerintah nasional dan daerah perlu mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, politik yang terjadi. Jika dibutuhkan pemrograman ulang atau *refocusing* prioritas program perlu dilakukan demi tercapainya hasil yang diinginkan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan.

Kelembagaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu dipertegas dan didorong efektivitasnya. Meskipun kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara holistik dan lintas sektor, tetapi saat ini terdapat beberapa institusi yang dimandatkan untuk mengambil peran terdepan dalam mengkoordinir upaya pengurangan kemiskinan di tingkat pusat maupun daerah. Seperti contohnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang sudah dibentuk sejak tahun 2011 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 yang memiliki mandat sebagai koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Struktur organisasi TKPK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 perlu dukungan penuh agar efektivitas program percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah dapat tercapai dan terukur. TKPK harus diperkuat agar dapat memegang kendali dalam perumusan program penanggulangan kemiskinan yang diusulkan oleh masing-masing OPD dan memiliki peran dalam memantau kemajuan dan pencapaian program-



program kemiskinan. TKPK juga harus diberdayakan untuk dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan pengumpulan dan validasi data terkait kemiskinan yang dibutuhkan bagi pembangunan yang *pro-poor* (optimalisasi fungsi dan peran Pokja Pendataan dan Sistem Informasi pada TKPK). Selain itu TKPK diharapkan dapat men-dorong kerjasama dan koordinasi antar OPD dalam halnya pengumpulan data dan melakukan analisa kemiskinan sebagai masukan perumusan kebijakan dan perencanaan serta penganggaran yang berpihak bagi masyarakat miskin.

### 3.2. Starategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada pasal 17 Permendagri No. 53/2020, adalah:

- (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- (2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- (3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- (4) sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk strategi ke satu, yaitu "*mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin*", hal mendasar yang perlu dilakukan adalah (1) *penyempurnaan dan perbaikan sistem perlindungan sosial yang komprehensif*, (2) *perluasan dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar*, serta (3) *pengurangan kesenjangan antar penduduk maupun kelompok*. Untuk strategi kedua dengan *peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif*, sedangkan pada strategi ketiga adalah dengan *mengem-*



*bangkan inovasi daerah program penanggulangan kemiskinan yang bernuansa pemberdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan kehidupan berkelanjutan.*

Dalam rangka mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (strategi ke empat), maka *penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan* (dalam hal ini TKPK Kabupaten Mojokerto) adalah sebuah keniscayaan. Dua hal penting dalam penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah: (1) *penguatan Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang mumpuni dalam mengelola dan menyajikan data-data kemiskinan menjadi informasi yang up to date*; dan (2) *meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (corporate social responsibility), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Media Massa melalui kemitraan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.*

Tabel berikut memberi gambaran tentang upaya-upaya dalam pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan.



Tabel 3.1  
Upaya-Upaya dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi / Upaya (1)	Fokus Program /Kegiatan (2)	Fokus Pemanfaat (3)	Fokus Wilayah Intervensi (4)
<i>strategi 1: pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.</i>			
(1) penyempurnaan program perlindungan sosial;	▪ pelayanan pendidikan	anak usia 7-18 th tidak sekolah pada Desil 1 s/d Desil 4 DTKS	▪ tahun ke-1 pada lokasi prioritas 1 ▪ tahun ke-2 pada lokasi prioritas 1 dan 2
(2) perluasan dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar	▪ pelayanan kesehatan  ▪ pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok	individu dgn masalah kesehatan dan kebutuhan khusus pada semua Desil pada DTKS  fokus Desil 1 dan 2 pada DTKS	▪ tahun ke-3 pada lokasi prioritas 1, 2, dan 3 ▪ tahun 4 dan 5 pada semua lokasi
(3) pengurangan kesenjangan antar penduduk maupun kelompok	▪ perluasan akses ketersediaan pra sarana dasar  ▪ akses perumahan layak huni	▪ rumah tangga dgn sumber air minum tak terlindungi; ▪ rumah tangga tanpa fasilitas BAB dan Pam-buangan akhir tinja; ▪ rumah tangga tanpa penerangan lis trik (PLN-non PLN) semua Desil DTKS  rumah dengan kondisi RTLH pd semua Desil DTKS	▪ tahun ke-1 pada lokasi prioritas 1 ▪ tahun ke-2 pada lokasi prioritas 1 dan 2 ▪ tahun ke-3 pada lokasi prioritas 1, 2, dan 3 ▪ tahun 4 dan 5 pada semua lokasi
<i>strategi 2: peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.</i>			
peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif	▪ pembekalan kewirausahaan ▪ pelatihan ketrampilan teknis	individu tidak bekerja pada DTKS	▪ tahun ke-1 pada lokasi prioritas 1 ▪ tahun 2 dan 3 pd lokasi prioritas 2 dan 3

Strategi / Upaya	Fokus Program /Kegiatan	Fokus Pemanfaat	Fokus Wilayah Intervensi
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ akses kemudahan usaha dan permodalan</li> </ul>	semua individu bekerja Desil 3 dan 4 DTKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tahun 4 dan 5 pada semua lokasi</li> </ul>
<p>strategi 3: <i>pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil.</i></p>			
<p>pengembangan program penanggulangan kemiskinan (inovasi daerah) bernuansa pemberdayaan masyarakat dgn muatan pengembangan kehidupan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>		<p>pada semua lokasi</p>
<p>strategi 4: <i>sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.</i></p>			
(1) penguatan sekretariat TKPK;	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ penyediaan peralatan;</li> <li>▪ penguatan SDM sekretariat TKPK;</li> <li>▪ meningkatkan koordinasi dan monev.</li> </ul>	---	---
(2) Peningkatan keterlibatan masyarakat dan stakeholder lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ menyusun <i>directory</i> CSR</li> <li>▪ Koordinasi lintas sektor</li> </ul>	---	---

Sumber: RPKD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025

Kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan (RPKD) Tahun 2021-2025 adalah:



#### Kebijakan Umum:

1. Sinkronisasi data penerima bantuan (warga miskin) agar tepat sasaran;
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial;
3. Koordinasi antar lembaga social dalam meningkatkan modal social masyarakat; dan
4. Penataan kawasan perkampungan yang lebih aman, nyaman, sehat, dan teratur.

#### Kebijakan khusus:

- 1) Kebijakan pemenuhan hak atas layanan pendidikan:
  - 1.1) Memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat untuk pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan biaya terjangkau;
  - 1.2) Peningkatan kualitas hasil pendidikan (mutu lulusan);
  - 1.3) Peningkatan kualitas tenaga pendidik;
  - 1.4) Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah (pendidikan);
  - 1.5) Peningkatan kapasitas manajemen sekolah.
- 2) Kebijakan pemenuhan hak atas layanan kesehatan:
  - 2.1) Memperluas akses kesehatan untuk semua kalangan masyarakat dengan biaya terjangkau;
  - 2.2) Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar terutama yang terkait dengan penanganan Covid-19;
  - 2.3) Pemenuhan kapasitas tenaga kesehatan;
  - 2.4) Pengembangan RSUD melalui pola BLUD.



- 3) Kebijakan pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha:
  - 3.1) Meningkatkan kesempatan kerja melalui pertumbuhan jumlah investor;
  - 3.2) Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan;
  - 3.3) Peningkatan kerjasama tripartite;
  - 3.4) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan balai latihan kerja (BLK);
  - 3.5) Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;
  - 3.6) Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM.
  
- 4) Kebijakan pemenuhan hak atas pangan:
  - 4.1) Peningkatan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan;
  - 4.2) Membangun kawasan pertanian berbasis potensi wilayah;
  - 4.3) Penganekaragaman produksi pangan;
  - 4.4) Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang;
  - 4.5) Peningkatan perlindungan konsumen;
  - 4.6) Melakukan gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) berbasis teknologi informasi.
  
- 5) Kebijakan pemenuhan hak atas perumahan:
  - 5.1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan pedesaan;
  - 5.2) Pengembangan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat;



- 5.3) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat.
- 6) Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih:
  - 6.1) Peningkatan perlindungan terhadap sumberdaya air dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan sanitasi;
  - 6.2) Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air;
  - 6.3) Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumberdaya air dan sanitasi layak;
  - 6.4) Pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.
- 7) Kebijakan pemberdayaan perempuan:
  - 7.1) Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan gender;
  - 7.2) Mengembangkan SDM perempuan yang berdaya saing sehingga memiliki akselerasi dan eksistensi peran perempuan dalam pengembangan organisasi;
  - 7.3) Meningkatkan kepekaan social dan solidaritas pendampingan terhadap kasus-kasus KDRT dan pelecehan seksual; dan
  - 7.4) Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.





# RENCANA AKSI TAHUNAN



*dokumen*

**RAT Nangkis Kab. Mojokerto**



## **BAB IV**

# **RENCANA AKSI TAHUNAN**

Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto merupakan serangkaian program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1 Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1.01 BIDANG PENDIDIKAN</b>				<b>126.082.824.300</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>			126.082.824.300	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Dasar			60.372.606.500	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.21	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil peserta didik	Biaya sekolah gratis peserta didik SD	60.372.606.500	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			43.010.217.800	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.32	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yg menerima biaya personil peserta didik	Biaya sekolah gratis peserta didik SMP	43.010.217.800	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			22.400.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.11	Penyediaan biaya personil peserta didik PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	Biaya sekolah gratis peserta didik PAUD	22.400.000.000	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			300.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.10	Penyediaan biaya personil peserta didik non formal/ kesetaraan	Jumlah peserta didik nonformal/ kesetaraan yg menerima biaya personil peserta didik	Biaya sekolah gratis peserta didik kesetaraan	300.000.000	
<b>1.02 BIDANG KESEHATAN</b>				<b>70.271.197.000</b>	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.</b>			70.271.197.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./ Kota.			70.271.197.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah penderita TB yg mendapatkan pelayanan kesehatan		729.800.000	Dinas Kesehatan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Peningkatan kapasitas kader utk pengawasan menelan minum obat 2000 pasien</li> <li>◆ Pengadaan BMHP (masker dll)</li> <li>◆ Peningkatan Kapasitas petugas</li> <li>◆ Rapat lintas program dan lintas sektor</li> </ul>	120.000.000	
				118.000.000	
				19.800.000	
				60.000.000	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah dok. hasil pengelolaan yankes gizi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pembelian Suplemen ( susu )</li> <li>◆ Konsul dan Pengambilan Obat</li> <li>◆ Media KIE</li> <li>◆ Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Gizi (2 org x 27 pemegang program gizi)</li> <li>◆ Pertemuan perencanaan dan Evaluasi Program Peningkatan ASI Eksklusif KLA (54 orang penanggungjawab ruang laktasi di TTU)</li> <li>◆ Pertemuan Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)</li> <li>◆ Honorarium Tim Stunting Kabupaten</li> <li>◆ Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) untuk Kader (kader posyandu 25 org x 4 angkatan)</li> </ul>	<p>388.800.000</p> <p>3.900.000</p> <p>19.300.000</p> <p>1.392.845.000</p> <p>81.450.000</p> <p>40.425.000</p> <p>40.425.000</p> <p>115.350.000</p> <p>131.300.000</p>	Dinas Kesehatan

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Pelatihan Pemantauan Tumbuh Kembang untu Kader Posyandu (kader posyandu 25 org x 3 angkatan</li> <li>♦ Monev Program Gizi (27 Puskesmas x 3 kali x 3 org)</li> <li>♦ Monev Program Peningkatan ASI Eksklusif oleh Tim KLA</li> <li>♦ Monev Tim Stunting</li> <li>♦ Pengadaan Susu Balita</li> <li>♦ Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus, F75/F100 (30 balita x 10 sachet x 5 hari)</li> <li>♦ Susu Tinggi Kalori Protein 150 balita x 20 box x 1 paket x 100.000</li> <li>♦ Susu Soya 30 balita x 20 box x 1 paket x 90.000</li> </ul>	<p>22.275.000</p> <p>53.120.000</p> <p>30.335.000</p> <p>11.535.000</p> <p>0</p> <p>30.000.000</p> <p>300.000.000</p> <p>54.000.000</p>	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelo-laan Jamkesmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Pengadaan Susu Tinggi Kalori untuk Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis) 243 bumil x 20 box x 80.000</li> <li>♦ Perencanaan dan Evaluasi Puskesmas Ramah Anak (27 Puskesmas)</li> <li>♦ Pengadaan Sarana Taman Bermain</li> <li>♦ Premi Iuran PBID 141.945 org x 12 x Rp. 35.000,00</li> <li>♦ Premi Bantuan Iuran PBID 141.945 org x 12 x Rp. 2.800,00</li> <li>♦ Premi Bantuan Iuran Kelas III Mandiri 112.000 x 12 x Rp. 2.800,00</li> </ul>	<p>388.800.000</p> <p>77.830.000</p> <p>16.000.000</p> <p>68.148.552.000</p> <p>59.616.000.000</p> <p>4.769.352.000</p> <p>3.763.200.000</p>	Dinas Kesehatan

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1.03 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>20.100.000.000</b>	
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>			14.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			14.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01.01	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis masyarakat	Pembangunan jaringan pipa air minum	14.800.000.000	
1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>			5.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota.			5.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	Pembangunan SPAL	5.300.000.000	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1.04 BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>1.100.189.000</b>	
1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>			1.100.189.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.100.189.000	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah RTLH yang diperbaiki	Perbaikan RTLH	65.000.000	
1.04.03.2.03.05	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh.	Luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar	Peremajaan permukiman kumuh	1.035.189.000	
<b>1.06 BIDANG SOSIAL</b>				<b>9.068.400.000</b>	
1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			1.130.000.000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			940.000.000	Dinas Sosial

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.04.2.01.01	Penyediaan permakanaan.	Jumlah orang yg mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota.	Pemberian permakanaan pada lansia miskin	615.000.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan sandang.	Jumlah orang yg menerima pakaian dan perlengkapan lainnya yg tersedia dalam 1 thn kewenangan kab/kota.	Pemberian bantuan pakaian	110.000.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan alat bantu.	Jumlah orang yg menerima alat bantu & alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota.	Bantuan kursi roda	200.000.000	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.	Jumlah orang yg terpenuhi kebutuhan pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak penyandang disabilitas kewenangan kab/kota	Fasilitai pembuatan NIK, akte kelahiran, KKdan identitas lain.	10.000.000	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.04.2.01.08	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.	Jumlah orang yg mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kab/kota	Layanan akses kesehatan ke puskesmas	5.000.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			190.000.000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.03	Penyediaan permakanan.	Jumlah orang yg mendapat permakanan	Pemberian permakanan pada PMKS	190.000.000	
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			7.688.400.000	Dinas Sosial
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.			7.688.400.000	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab./kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	Pelaksanaan verval data fakir miskin	520.000.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Pelaksanaan PKH	7.018.400.000	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan Ekonomi masyarakat	Bantuan dana bergulir	150.000.000	
1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>			250.000.000	Dinas Sosial
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			250.000.000	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.01	Penyediaan permakanan.	Jumlah orang yang mendapat bantuan	Bantuan makanan pada korban bencana	200.000.000	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan sandang.	Jumlah orang yang mendapat bantuan	Bantuan sandang pada korban bencana	50.000.000	
<b>2.07 BIDANG TENAGA KERJA</b>				<b>1.606.000.000</b>	
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>			1.071.000.000	Dinas tenaga Kerja
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.			1.071.000.000	Dinas tenaga Kerja
2.07.03.2.01.01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah tenaga kerja yg mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Pelaksanaan pelatihan berdasat kompetensi	1.071.000.000	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>			300.000.000	Dinas tenaga Kerja
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000	Dinas tenaga Kerja
2.07.04.2.01.05	Perluasan kesempatan kerja	Jumlah orang yg memperoleh program	Konseling pencari kerja	150.000.000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 150.000.000,00 160.500.000,00 2 07			150.000.000	Dinas tenaga Kerja
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pelaksanaan	Pelaksanaan Job fair	150.000.000	
2.07.05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>			235.000.000	Dinas tenaga Kerja
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			235.000.000	Dinas tenaga Kerja
2.07.05.2.02.05	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Jumlah orang yang menerima manfaat program	Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja	235.000.000	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2.09 BIDANG PANGAN</b>				<b>851.636.900</b>	
2.09.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>			245.000.000	Dinas Pangan dan Perikanan
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			245.000.000	Dinas Pangan dan Perikanan
2.09.02.2.01.01	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Jumlah infrastruktur yang tersedia	Pembangunan infrastruktur lumbung pangan	245.000.000	
2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>			606.636.900	Dinas Pangan dan Perikanan
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dgn Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.			155.636.900	Dinas Pangan dan Perikanan
2.09.03.2.01.01	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Jumlah informasi harga pangan	Pelaksanaan pengelolaan informasi harga pangan	80.636.900	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.09.03.2.01.04	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Stok, pasokan, harga pangan yg terpantau	Pelaksanaan pemantauan	75.000.000	Dinas Pangan dan Perikanan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota.			251.000.000	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota.	Jumlah cadangan pangan tersedia	Pengadaan cadangan pangan	221.000.000	
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota			30.000.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			200.000.000	
2.09.03.2.04.01	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah kelompok masyarakat yg menerima program	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	200.000.000	
<b>2.11 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>320.000.000</b>	
2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>			320.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			320.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.04	Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengelolaan sampah	Jumlah kelompok masyarakat	Bansos pada warga terdampak TPA	320.000.000	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2.12 BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL</b>				<b>707.772.000</b>	
2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>			363.772.000	Dinas Dukcapil
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk.			363.772.000	Dinas Dukcapil
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk.	Jumlah orang yang memanfaatkan pendaftaran penduduk	Pelaksanaan pendaftaran penduduk	363.772.000	
2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			344.000.000	Dinas Dukcapil
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.			344.000.000	Dinas Dukcapil
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan penyajian data kependudukan.	Jumlah data kependudukan yg tersaji	Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data kependudukan	344.000.000	
<b>2.13 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA:</b>				<b>562.500.000</b>	
2.13.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>			130.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa.			130.000.000	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota.		Pembinaan dan fasilitasi pembentukan BUM-DESMA dari hasil PNPM Mandiri Perdesaan BUM-DESMA memberikan pinjaman dan modal usaha pada RTM dgn jasa rendah dan tanpa agunan, BUMDESMA juga memberi Dana Sosial u/RTM yg ada di Desa berupa sembako, khitanan masal, bantuan anak yatim, dll.	130.000.000	
2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.</b>			163.750.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.			163.750.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa.		Penyaluran dana desa untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) Pagu dana desa tahun anggaran	0	
2.13.04.2.01.08	Fasilitasi Pengembangan BUMDESA		Pembinaan, pelatihan, pendampingan pengelola BUMDESA di Kabupaten Mojokerto	163.750.000	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.</b>			268.750.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yg Sama dlm Daerah Kabupaten/Kota.			268.750.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi desa.		Peningkatan usaha ekonomi masyarakat fasilitasi penyaluran program pengentasan kemiskinan Jatim Puspa	68.750.000	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi tim penggerak PKK dlm penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pelatihan Kepribadian dan Beauty Class</li> <li>◆ Pelatihan olahan frozen food</li> </ul>	200.000.000	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2.17 BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH:</b>				<b>390.000.000</b>	
2.17.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI.</b>			65.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.			65.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan kabupaten / Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Penilaian tingkat kesehatan koperasi untuk menentukan koperasi tersebut layak /tidak memberikan pinjaman kepada anggotanya	65.000.000	
2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM).</b>			150.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.07.201	Pemberdayaan Usaha Mikro yg Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.			150.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.07.201.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah data potensi dan pengembangan usaha mikro	Pendataan potensi usaha mikro sehingga dapat ditentukan intervensi kebijakan yang tepat untuk pengembangannya	50.000.000	
2.17.07.201.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Layanan pendampingan usaha, baik dari sisi legalitas, produk maupun pelatihan bagi calon wirausaha baru melalui Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro	100.000.000	
2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM.</b>			175.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.08.201	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil.			175.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yg terfasilitasi dlm pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Inkubasi Bisnis, yaitu menciptakan wirausaha baru berskala mikro yang segmented, didampingi dan dilatih sejak calon wirausaha sampai dengan produknya siap dipasarkan dan memiliki legalitas	175.000.000	

Sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka pada bab ini direkomendasikan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Mojokerto dengan spesifikasi penerima manfaat adalah individu/rumah tangga miskin ekstrem.

Tabel 4.2  
Rekomendasi Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem  
Kabupaten Mojokerto

Nama OPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
(1)	(2)	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk.
	2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan penyajian data kependudukan.	
Dinas Sosial	1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN dan JAMINAN SOSIAL</b>
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab./kota
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
Dinas Pendidikan	1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Dasar
	1.01.02.2.01.02	Pembangunan ruang kelas baru
	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
	1.01.02.2.01.17	Pengadaan perlengkapan siswa

Lanjutan tabel 4.2

Nama OPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
(1)	(2)	
	1.01.02.2.01.21 1.01.02.2.02 1.01.02.2.02.02 1.01.02.2.02.14 1.01.02.2.02.28 1.01.02.2.02.32	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama Pembangunan ruang kelas baru Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Pengadaan perlengkapan siswa Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar
Dinas Kesehatan	1.02.02 1.02.02.2.01 1.02.02.2.01.22 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.15 1.02.02.2.02.26 1.02.05 1.02.05.2.02 1.02.05.2.02.01	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PER-ORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.</b> Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.</b> Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04 2.13.04.2.01 2.13.04.2.01.08 2.13.05 2.13.05.2.01	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.</b> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Fasilitas Pengembangan BUMDESA <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.</b> Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yg Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga

Lanjutan tabel 4.2

Nama OPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
(1)	(2)	
	2.13.05.2.01.05	Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yg Sama dlama Daerah Kab./Kota. Fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi desa.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03 1.03.03.2.01 1.03.03.2.01.01	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.03 1.04.03.2.03 1.04.03.2.03.02	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b> Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan rumah tidak layak huni
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.05 2.17.05.2.01 2.17.05.2.01.01 2.17.06 2.17.06.2.01 2.17.06.2.01.01	<b>PROGRAM PENDIDIKAN dan LATIHAN PERKOPERASIAN</b> Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN dan PERLINDUNGAN KOPERASI</b> Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Tenaga Kerja	2,07,03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA dan PRODUKTIVITAS KERJA</b>

Lanjutan tabel 4.2

Nama OPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
(1)	(2)	
	2,07,03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	2,07,03.2.01.01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
	2.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>
	2.07.04.2,01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
	2.07.04.2,01.03	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja
	2.07.04.2,01.05	Perluasan kesempatan kerja
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	2.07.04.2.03.03	Job fair / bursa kerja
	2.07.05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>
	2.07.05.2.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	2.07.05.2.02.05	Pengembangan pelaksanaan jaminan social tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja
Dinas Pertanian	3,27,03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>
	3.27.03.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	3.27.03.2.01.02	Pendampingan penggunaan sarana pendukung Pertanian
	3,27,04	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>
	3,27,04.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
	3,27,04.2.01.03	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	3.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.01.03	Pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota

Lanjutan tabel 4.2

Nama OPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)
	<p>3.26.02.2.02.06 PEMBERDAYAAN masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p>3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota</p> <p>3.26.02.2.03..06 PEMBERDAYAAN masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p>3.26.05 <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b></p> <p>3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</p> <p>3.26.05.2.02.01 Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif</p>



# **PENUTUP**

*dokumen*  
**RATPK 2024 Kab. Mojokerto**

## BAB V

# PENUTUP

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang mendesak dan memerlukan upaya penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut perlu diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat untuk menempuh kehidupan yang bermartabat. Besar dan beratnya beban penanggulangan kemiskinan memerlukan dukungan kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan kondisi dimaksud, pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan. Agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menyusun rumusan kebijakan tersebut dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) berikut Rencana Aksi Tahunan (RAT). Diharapkan dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi salah satu cara yang tepat dan terarah dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan peran penanggulangan kemiskinan di daerah.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan ini diharapkan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu dokumen ini perlu diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD ataupun dalam Renja OPD.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, implementasi RAT ini perlu dilakukan dan didukung melalui sinergitas program dan anggaran dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur DPRD, masyarakat maupun swasta.

Seluruh pemangku kepentingan perlu merespon RAT ini dengan melakukan hal yang sama untuk menjamin sinergitas dan implementasi serta pencapaian target penurunan angka kemiskinan sesuai dengan kewenangannya. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.



- halaman ini sengaja dikosongkan -





## daftar pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2011. Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Statistik Kesejahteraan Rakyat - Welfare Statistics - 2022. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2022. Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2022. Mojokerto: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2022. Statistik Kesejahteraan Rakyat kabupaten Mojokerto 2022. Mojokerto: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2023. Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2023. Mojokerto: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2023. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022. Mojokerto: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2022. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2022. Surabaya: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2023. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 Surabaya: BPS.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. 2023. Profil Kesehatan Kabupaten Mojokerto, 2022. Mojokerto: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2023. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk Peren-

canaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Jakarta: Bappenas.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2010. Panduan Praktis Analisis Data untuk Mendukung Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: TNP2K.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2012. Panduan pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan - Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, cetakan pertama. September 2012. Jakarta: TNP2K.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2014. Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD. Jakarta: TNP2K.

Draf Final Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020.

-----, <https://www.bdt.tnp2k.go.id>

-----, <https://www.bps.go.id>

-----, <https://www.jatim.bps.go.id>

-----, <https://www.Mojokertokab.bps.go.id>

-----, <https://www.kemdikbud.go.id>

-----, <https://www.kemkes.go.id>

-----, <https://www.siskaperbapo.com/harga/tabel>

-----, <https://www.tnp2k.go.id>

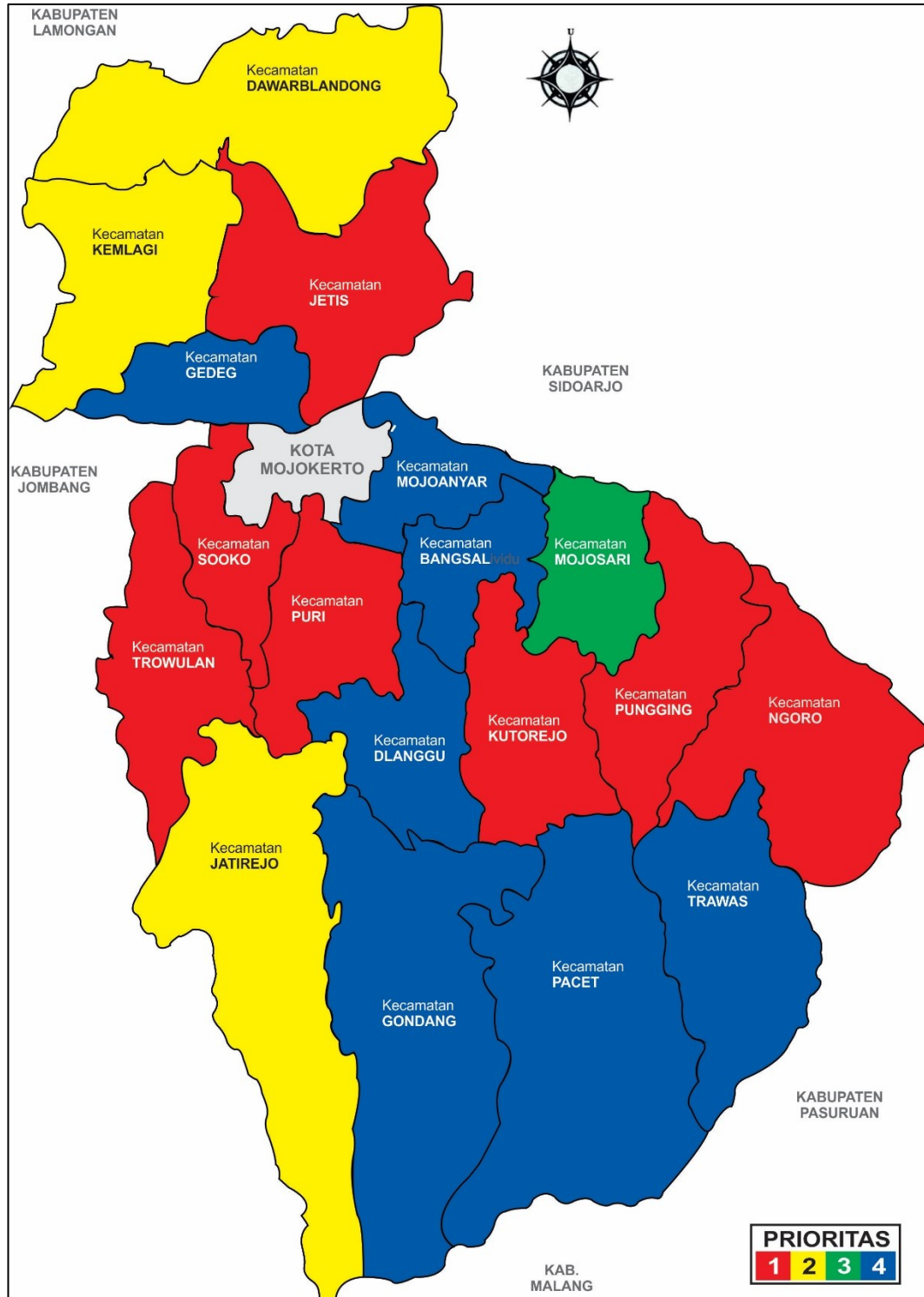




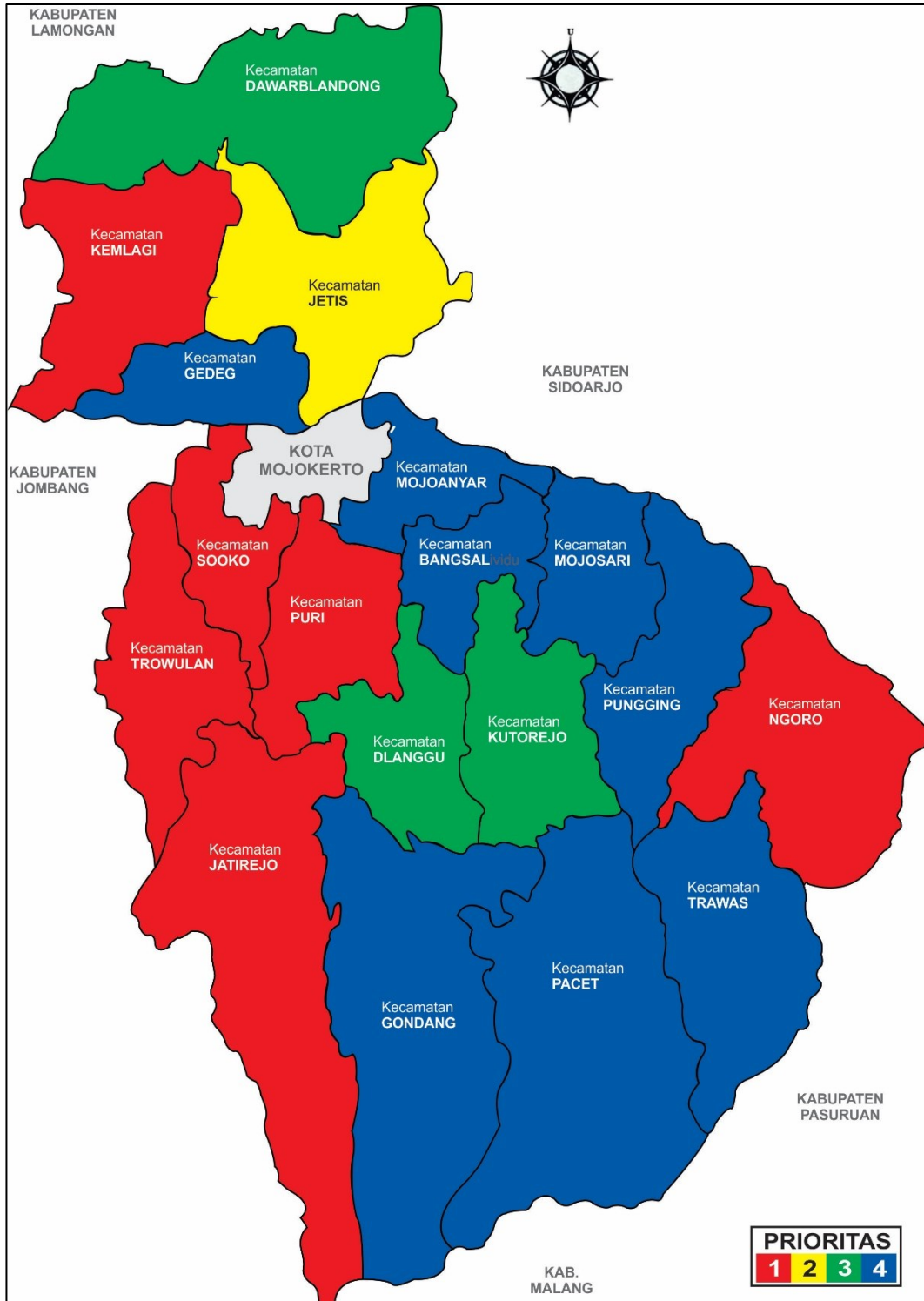
## **lampiran**

- Peta 01: Lokasi Prioritas terhadap Rumah Tangga Miskin.
- Peta 02: Lokasi Prioritas terhadap APK/APM SD Sederajat.
- Peta 03: Lokasi Prioritas terhadap APK/APM SMP Sederajat.
- Peta 04: Lokasi Prioritas terhadap APK/APM SMA Sederajat.
- Peta 05: Lokasi Prioritas terhadap Angka Kematian Bayi.
- Peta 06: Lokasi Prioritas terhadap Angka Kematian Balita.
- Peta 07: Lokasi Prioritas terhadap Angka Kematian Ibu.
- Peta 08: Lokasi Prioritas terhadap Penduduk Usia Kerja Tidak Bekerja.
- Peta 09: Lokasi Prioritas terhadap Rumah Tangga dengan Status Rumah Bukan Milik Sendiri.
- Peta 10: Lokasi Prioritas terhadap Desa Rawan Pangan.

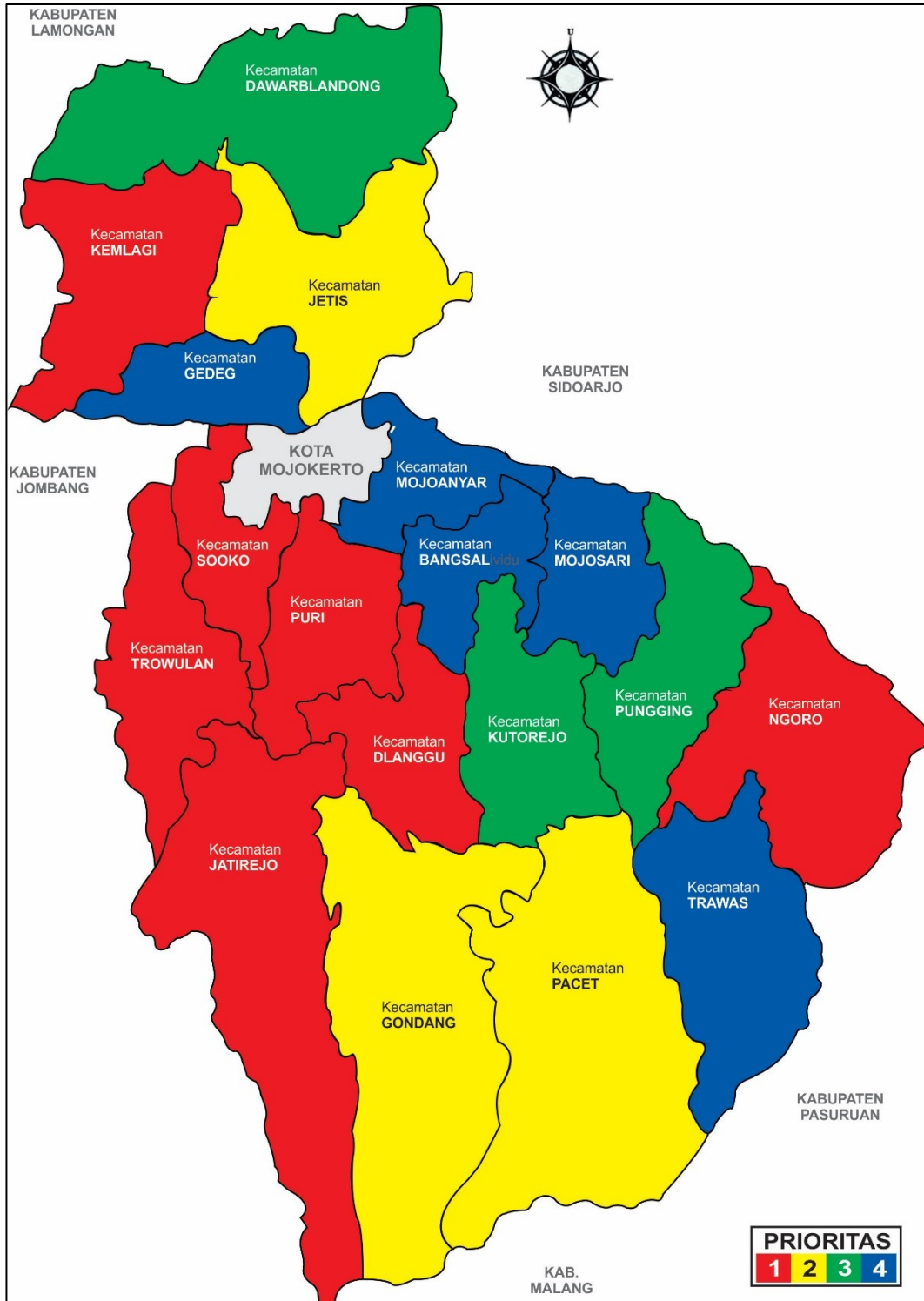
Peta 01: Lokasi Prioritas terhadap Rumah Tangga Miskin.



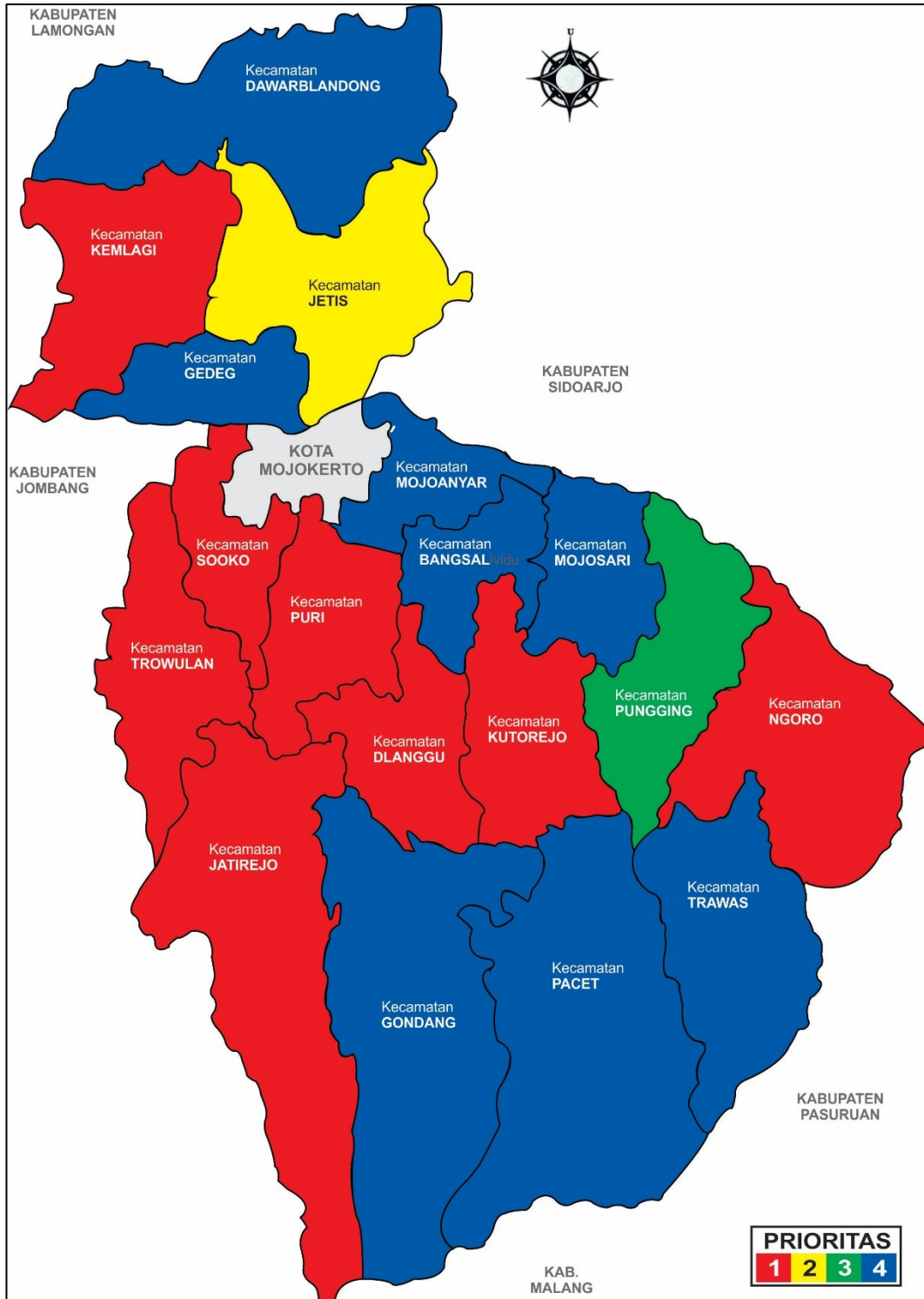
Peta 02: Lokasi Prioritas terhadap APK/APM SD Sederajat.



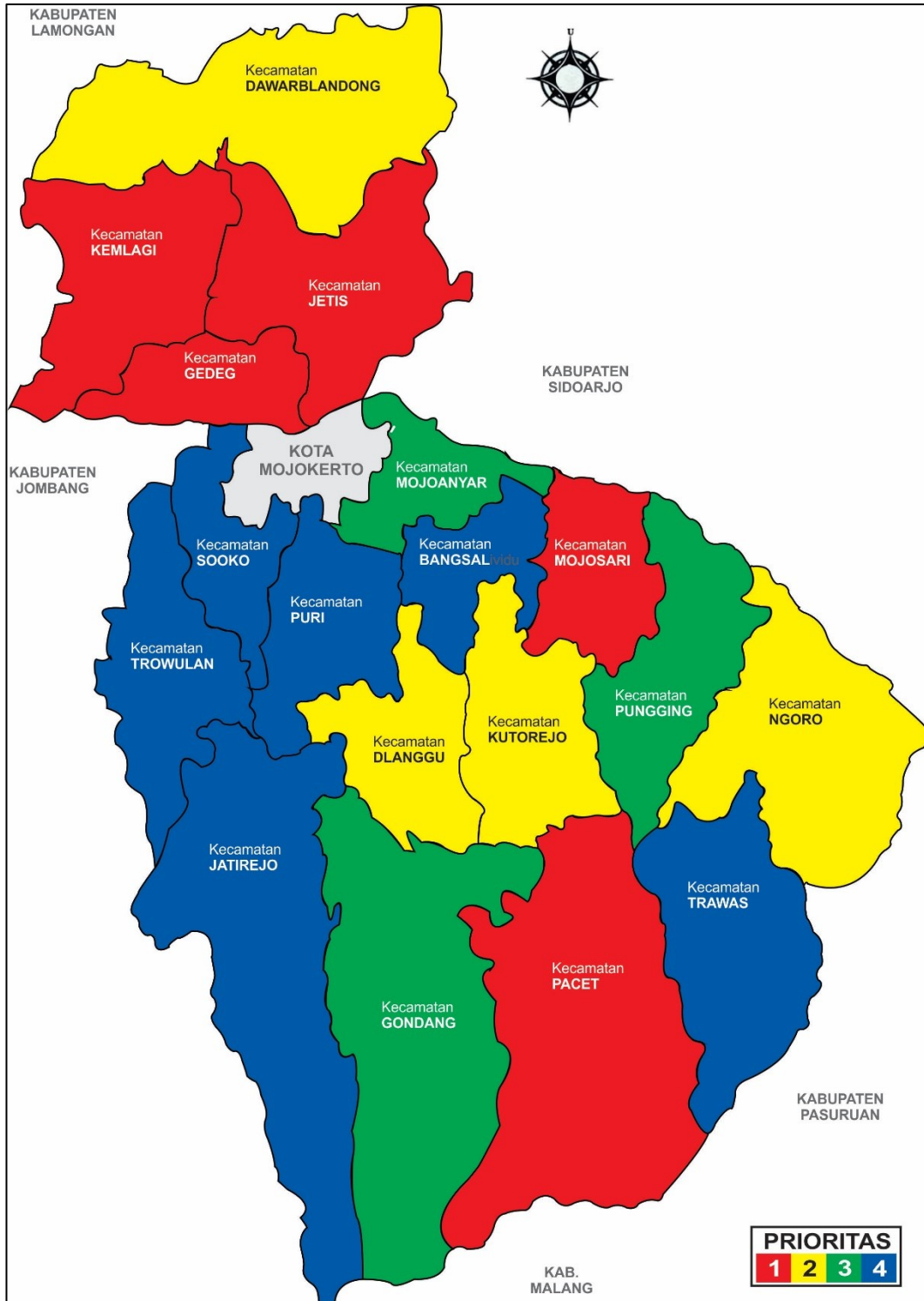
Peta 03: Lokasi Prioritas terhadap APK/APM SMP Sederajat.



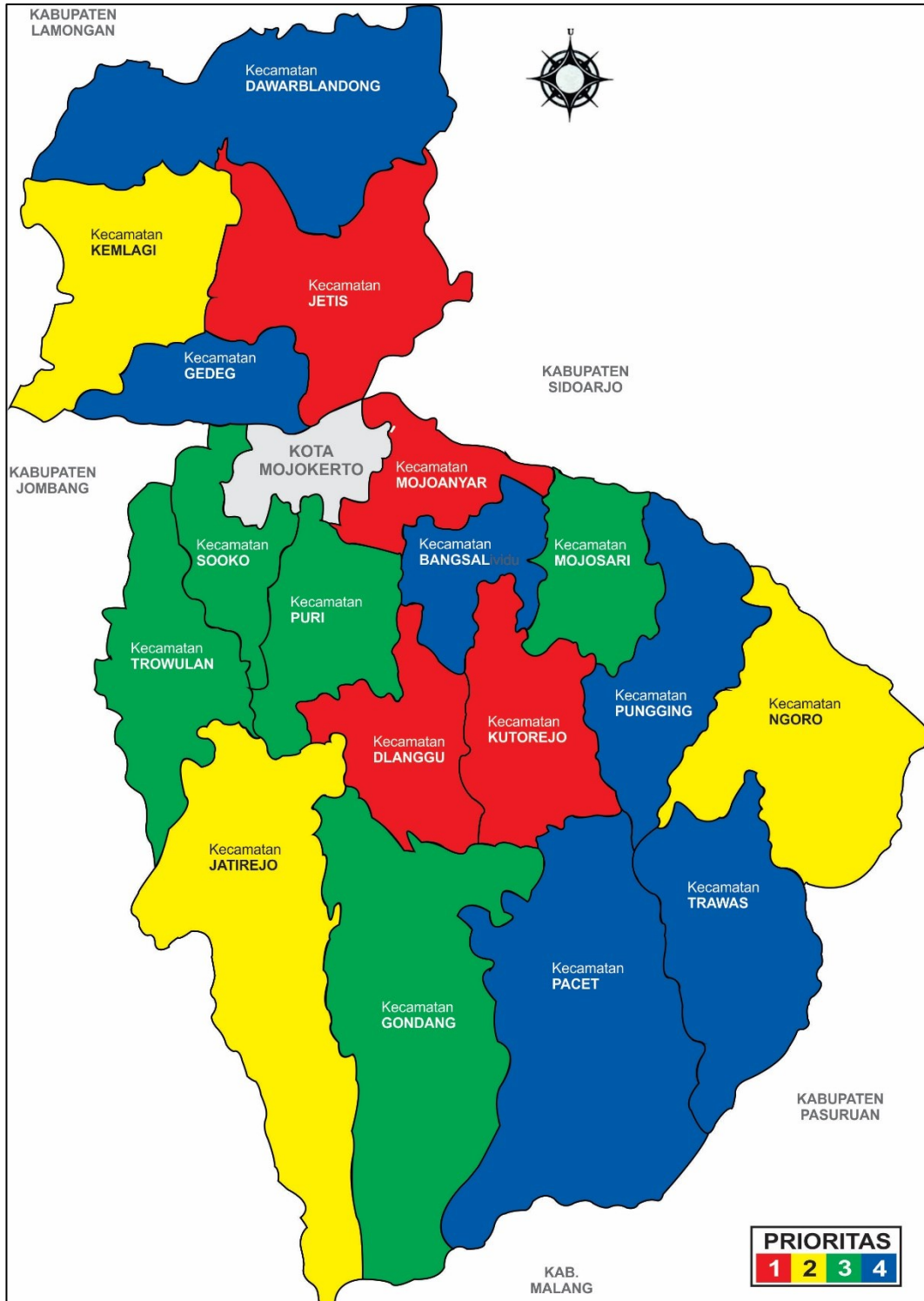
Peta 04: Lokasi Prioritas terhadap APK/APM SMA Sederajat.



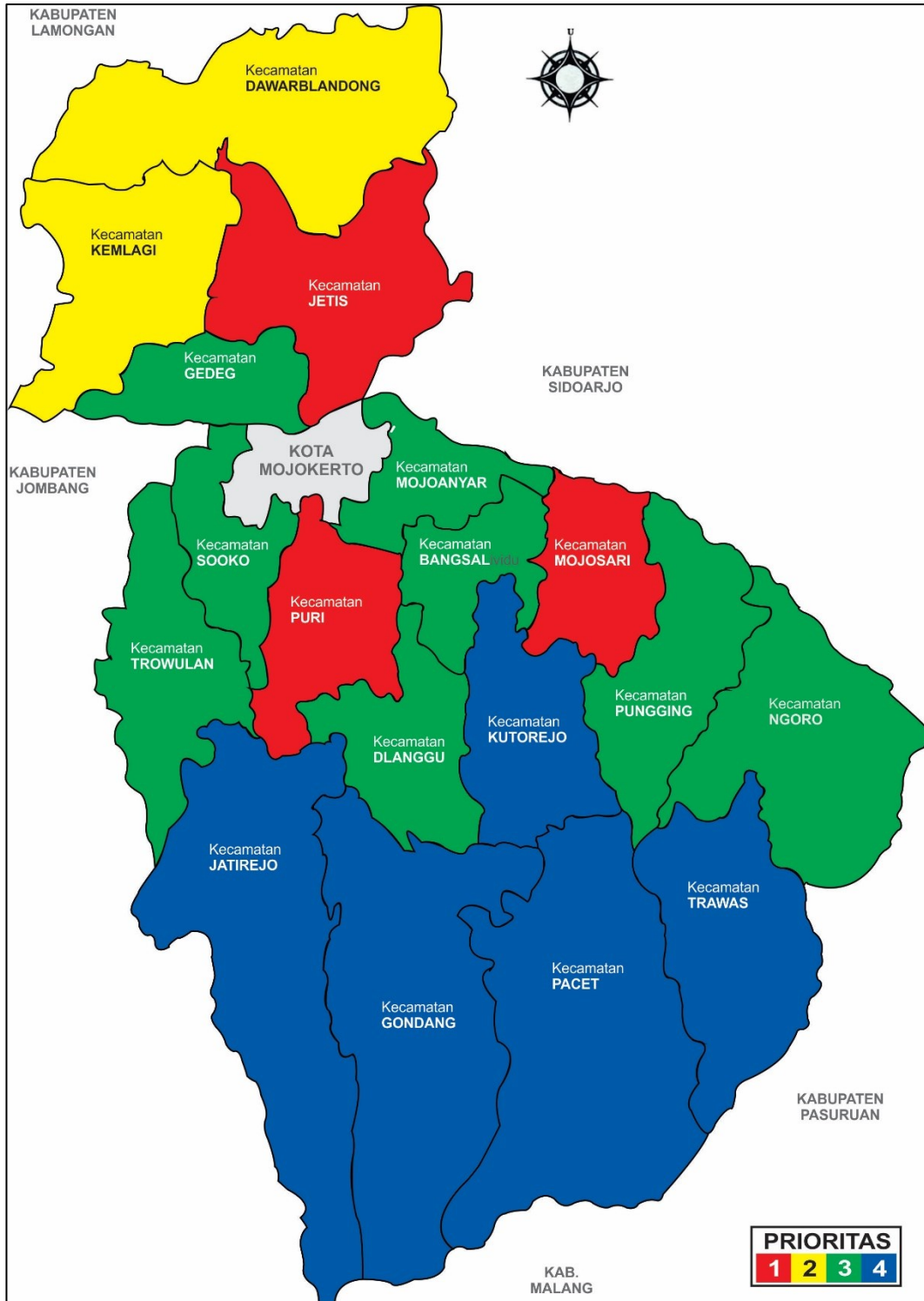
Peta 05: Lokasi Prioritas terhadap Angka Kematian Bayi.



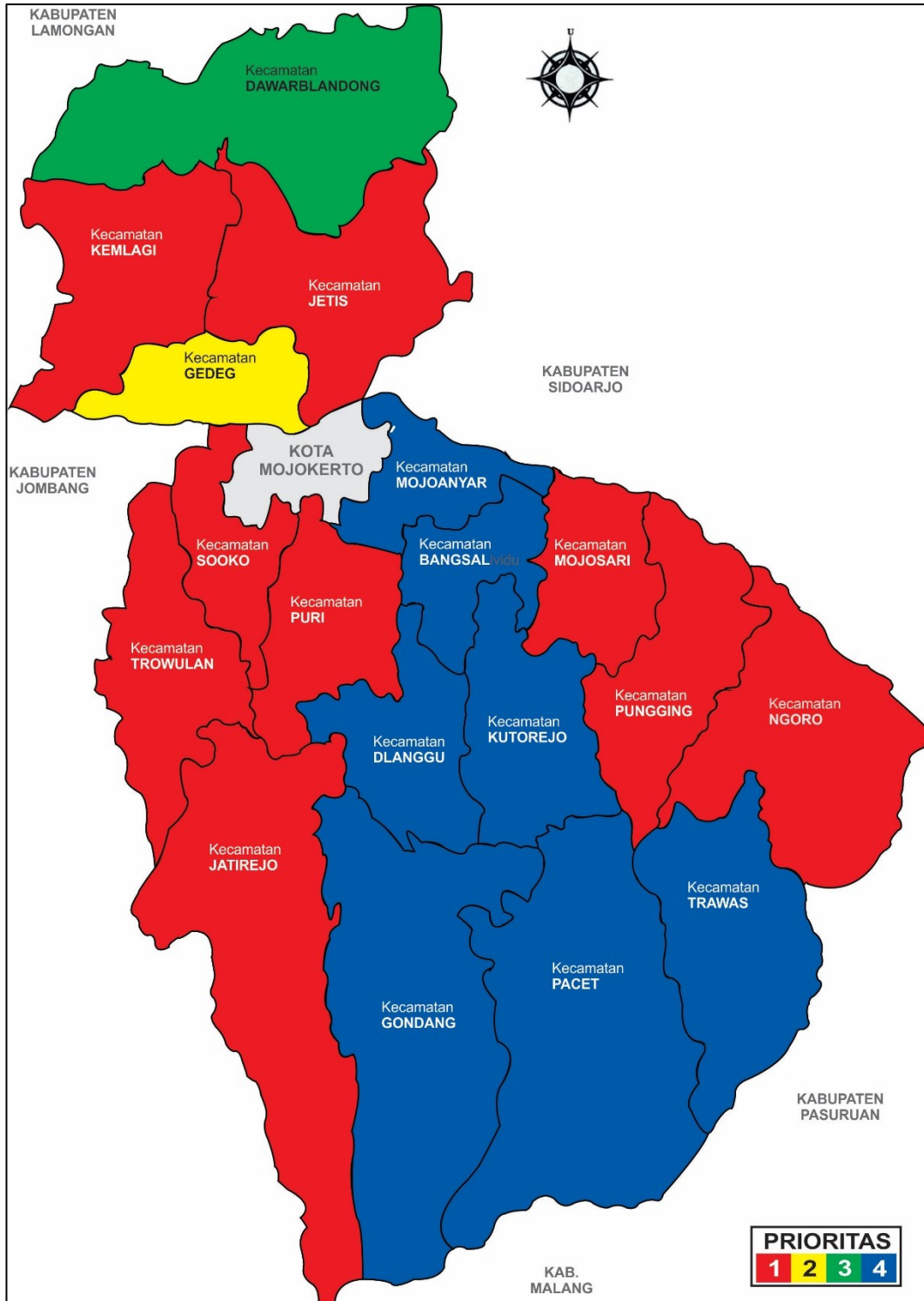
Peta 06: Lokasi Prioritas terhadap Angka Kematian Balita.



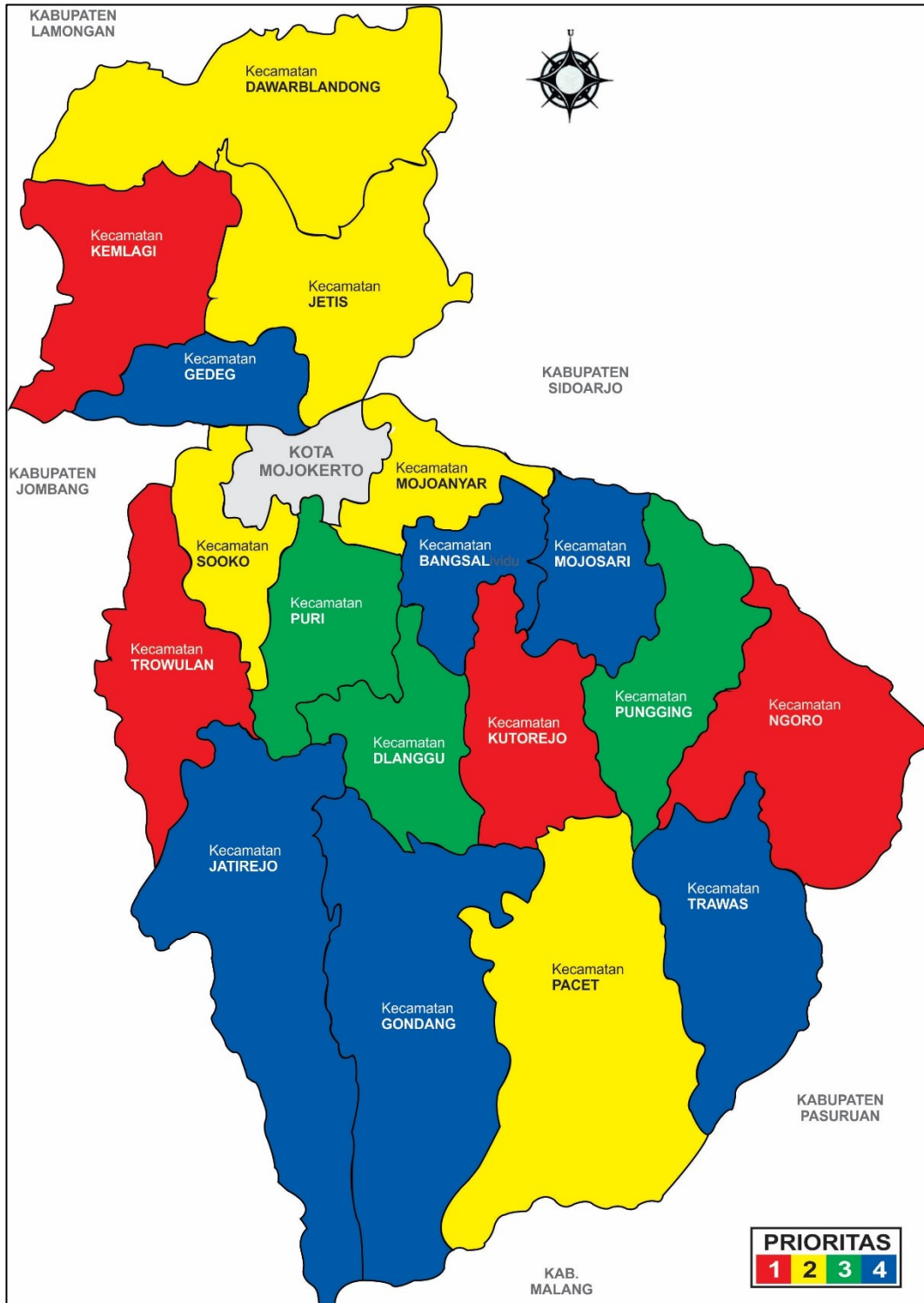
Peta 07: Lokasi Prioritas terhadap Angka Kematian Ibu.



Peta 08: Lokasi Prioritas terhadap Penduduk Usia Kerja Tidak Bekerja.



Peta 09: Lokasi Prioritas terhadap Rumah Tangga dengan Status Rumah Bukan Milik Sendiri.



Peta 10: Lokasi Prioritas terhadap Desa Rawan Pangan.

